



PEMERINTAH KOTA BANDUNG
SEKRETARIAT DAERAH

JALAN WASTUKANCANA NO. 2 Telp. 432338 – 432339 – 432369 – 432370 BANDUNG

SALINAN
KEPUTUSAN WALI KOTA BANDUNG
NOMOR: 027/Kep.329-BKAD/2022
TENTANG
STANDARISASI HARGA TERTINGGI SATUAN BARANG/JASA
TAHUN ANGGARAN 2022

WALI KOTA BANDUNG,

- Menimbang : a. bahwa Standar Satuan Harga Tertinggi Barang/Jasa di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung Tahun Anggaran 2021 telah ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota Bandung Nomor 027/Kep.1147-BPKA/2021 namun dalam perkembangannya terdapat usulan dari Perangkat Daerah tentang perubahan komponen pada kegiatan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Pergeseran Tahun 2022 sehingga terjadi penambahan komponen dan perubahan Satuan Harga Barang/Jasa Tahun Anggaran 2022, untuk itu perlu dilakukan penyesuaian dan ditetapkan kembali dengan Keputusan Wali Kota;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota tentang Standarisasi Harga Tertinggi Satuan Barang/Jasa Tahun Anggaran 2022;

Mengingat ...

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Dalam Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Pengubahan Undang-Undang Nomor 16 dan Nomor 17 Tahun 1950 (Republik Indonesia Dahulu) tentang Pembentukan Kota-kota Besar dan Kota-kota Kecil di Djawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (Covid 19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485);

3. Undang ...

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (Covid 19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan lembaran negara Republik Indonesia Nomor 6573);
6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

7. Peraturan ...

7. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
9. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 63);
10. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Satuan Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 57);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
12. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 60/PMK.02/2021 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2022 (Berita negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 658);
13. Peraturan ...

13. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 07 Tahun 2006 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Bandung Tahun 2006 Nomor 07) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 07 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 07 Tahun 2006 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Bandung Tahun 2015 Nomor 07);
14. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 08 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bandung (Lembaran Daerah Kota Bandung Tahun 2016 Nomor 08) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 08 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bandung (Lembaran Daerah Kota Bandung Tahun 2021 Nomor 3);
15. Peraturan Walikota Bandung Nomor 542 Tahun 2008 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Daerah Kota Bandung Tahun 2008 Nomor 26) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Wali Kota Bandung Nomor 984 Tahun 2017 tentang Perubahan Kesembilan Atas Peraturan Wali Kota Bandung Nomor 542 Tahun 2008 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Daerah Kota Bandung Tahun 2017 Nomor 57);
16. Peraturan Wali Kota Bandung Nomor 014 Tahun 2009 tentang Standarisasi Sarana dan Prasarana Kerja di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung (Berita Daerah Kota Bandung Tahun 2009 Nomor 02);

MEMUTUSKAN ...

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU : Standarisasi Harga Tertinggi Satuan Barang/Jasa di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung.
- KEDUA : Standarisasi Harga Tertinggi Satuan Barang/Jasa sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Wali Kota ini.
- KETIGA : Ketentuan Standarisasi Harga Tertinggi Satuan Barang/Jasa sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA digunakan sebagai penentuan harga atau nilai tertinggi dalam Pengadaan Barang dan Jasa di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung.
- KEEMPAT : Nilai atau harga barang dan jasa sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA sudah termasuk keuntungan dan biaya *overhead*.
- KELIMA : Nilai atau harga barang dan jasa sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA belum termasuk PPN (Pajak Pertambahan Nilai) sebesar 10% (sepuluh persen), terkecuali alat-alat kesehatan dan obat-obatan.
- KEENAM : Keputusan Wali Kota Bandung Nomor 027/Kep.1147-BPKA/2021 tentang Standarisasi Harga Tertinggi Satuan Barang/Jasa Tahun Anggaran 2021 masih tetap berlaku, dengan perubahan penambahan komponen jenis dan harga satuan barang sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Wali Kota ini.

KETUJUH ...

KETUJUH : Biaya pelaksanaan Keputusan Wali Kota ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Bandung.

KEDELAPAN : Keputusan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bandung
pada tanggal 8 April 2022
Plt. WALI KOTA BANDUNG,

TTD.

YANA MULYANA

Salinan sesuai dengan aslinya
Plt. KEPALA BAGIAN HUKUM
PADA SEKRETARIAT DAERAH KOTA BANDUNG, 


SANTOSA LUKMAN ARIEF, S.H.
Penata Tingkat I
NIP. 19760604 200604 1 00

Tembusan, Salinan Keputusan ini disampaikan Kepada Yth:

1. Gubernur Jawa Barat;
2. Wakil Wali Kota Bandung;
3. Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bandung;
4. Para Pimpinan Daerah Kota Bandung;
5. Para Asisten di Lingkungan Sekretaris Daerah Kota Bandung;
6. Inspektur Kota Bandung;
7. Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bandung;
8. Para Kepala Dinas, Badan, Kantor di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung;
9. Para Kepala Bagian di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung;
10. Para Direktur Utama Perusahaan Umum Daerah se-Kota Bandung;
11. Para Camat se-Kota Bandung;
12. Para Lurah se-Kota Bandung.

STANDAR SATUAN HARGA (SSH)
PEMERINTAH KOTA BANDUNG

KODE	NAMA BARANG	SPESIFIKASI	SATUAN	HARGA SATUAN	KODE REKENING
1	2		3	4	5
1	ASET				
1.1	ASET LANCAR				
1.1.12	Persediaan				
1.1.12.01	Barang Pakai Habis				
1.1.12.01.01	Bahan				
1.1.12.01.01.0001	Bahan Bangunan dan Konstruksi				
1.1.12.01.01.0001	Pengadaan dan Pemasangan Penerangan Jalan Umum Hias Maung Bandung 2 Cabang 3	Tiang Lampu Mb2 cabang 3	Unit	23,577,100	5.2.02.18.01.0003
1.1.12.01.01.0001	Pengadaan dan Pemasangan Penerangan Jalan Umum Hias Maung Bandung 2 Cabang 4	Tiang Lampu Mb2 cabang 4	Unit	25,552,100	5.2.02.18.01.0003
1.1.12.01.01.0012	Bahan Lainnya				
1.1.12.01.01.0012	REAGEN HIV/SIFILIS DUO	"Product Name Reagen HIV/Syphilis Duo Jenis Produk Sesuai Izin Edar Multiple autoantibodies immunological test system Fungsi Mendeteksi antibodi HIV tipe 1 dan 2. Mendeteksi antibodi Treponema palidum Spesifikasi Produk Secara Singkat Tes kualitati	Kit	17,564	5.1.02.01.01.0012
1.1.12.01.03	Alat/Bahan Untuk Kegiatan Kantor				
1.1.12.01.03.0013	Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya				
1.1.12.01.03.0013	DRY CLEAN	Jas Laboratorium Bahan Drill	Pcs	47,100	5.1.02.02.01.0049
1.1.12.01.03.0013	RH KLINIS	Alat Tes Psikologi - RH KLINIS	Rim	650,000	5.1.02.01.01.0036
1.1.12.01.03.0013	BUKU IST	Alat Tes Psikologi - BUKU IST	Buku	25,000	5.1.02.01.01.0036
1.1.12.01.03.0013	LJ IST	Alat Tes Psikologi - LJ IST	Rim	375,000	5.1.02.01.01.0036
1.1.12.01.03.0013	LJ FRT	Alat Tes Psikologi - LJ FRT	Rim	225,000	5.1.02.01.01.0036
1.1.12.01.03.0013	KOTAK WISC	Alat Tes Psikologi - KOTAK WISC	Kotak	1,200,000	5.1.02.01.01.0036
1.1.12.01.03.0013	KARTU CAT	Alat Tes Psikologi - KARTU CAT	Buah	4,750,000	5.1.02.01.01.0036
1.1.12.01.03.0013	MANUAL WBIS	Alat Tes Psikologi - MANUAL WBIS	Buku	20,000	5.1.02.01.01.0036
1.1.12.01.03.0013	PROTOKOL WBIS	Alat Tes Psikologi - PROTOKOL WBIS	Rim	675,000	5.1.02.01.01.0036
1.1.12.01.03.0013	MANUAL WISC	Alat Tes Psikologi - MANUAL WISC	Buku	20,000	5.1.02.01.01.0036
1.1.12.01.03.0013	PROTOKOL WISC	Alat Tes Psikologi - PROTOKOL WISC	Rim	675,000	5.1.02.01.01.0036
1.1.12.01.03.0013	KOTAK SB	Alat Tes Psikologi - KOTAK SB	Kotak	1,950,000	5.1.02.01.01.0036
1.1.12.01.03.0013	MANUAL SB	Alat Tes Psikologi - MANUAL SB	Buku	24,000	5.1.02.01.01.0036
1.1.12.01.03.0013	PROTOKOL SB	Alat Tes Psikologi - PROTOKOL SB	Set	20,000	5.1.02.01.01.0036
1.1.12.01.03.0013	LJ FORER	Alat Tes Psikologi - LJ FORER	Rim	475,000	5.1.02.01.01.0036

KODE	NAMA BARANG	SPESIFIKASI	SATUAN	HARGA SATUAN	KODE REKENING
1	2		3	4	5
1.3.02.18.01.0003	Rambu-Rambu Lalu Lintas Darat Lainnya				
1.3.02.18.01.0003	Pengadaan dan Pemasangan Papan Nama Jalan	Pengadaan dan Pemasangan Papan nama jalan	Unit	1,050,000	5.2.02.18.01.0002
1.3.02.18.01.0003	Pengadaan Daun Papan Nama Jalan	Pengadaan Daun Papan Nama Jalan	Buah	234,000	5.2.02.18.01.0002
1.3.02.18.01.0003	Pengadaan Bahan Cermin Tikungan Ukuran 60 Cm	Pengadaan Bahan Cermin Tikungan Ukuran 60 Cm	Buah	1,796,000	5.2.02.18.01.0003
1.3.02.18.02	Rambu-rambu Lalu Lintas Udara				
1.3.02.18.02.0007	Rambu-Rambu Lalu Lintas Udara Lainnya				
1.3.02.18.02.0007	Pengadaan Bahan Cermin Tikungan Ukuran 80 Cm	Pengadaan Bahan Cermin Tikungan Ukuran 80 Cm	Buah	2,750,000	5.2.02.18.01.0003
8	BEBAN DAERAH				
8.1	BEBAN OPERASI				
8.1.02	Beban Barang dan Jasa				
8.1.02.03	Beban Pemeliharaan				
8.1.02.03.02	Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin				
8.1.02.03.02.0463	Beban Pemeliharaan Alat Peraga-Alat Peraga Pelatihan dan Percontohan-Alat Peraga Pelatihan				
8.1.02.03.02.0463	Biaya Workshop/Seminar/Diklat	Workshop/Seminar/Diklat yang dilakukan secara Virtual	Orang	150,000	5.1.02.02.12.0001
8.1.02.03.02.0463	Biaya Workshop/Seminar/Diklat/Daring	Workshop/Seminar/Diklat/Daring yang dilakukan secara virtual	Orang	250,000	5.1.02.02.12.0001
8.1.02.03.02.0463	Biaya Workshop/Seminar/Diklat	Workshop/Seminar/Diklat/Daring yang dilakukan secara virtual	Orang	500,000	5.1.02.02.12.0001
8.1.02.03.02.0463	Biaya Workshop/Seminar/Diklat	Workshop/Seminar/Diklat/Daring yang dilakukan secara virtual	Orang	1,000,000	5.1.02.02.12.0001
8.1.02.03.04	Beban Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi				
8.1.02.03.04.0006	Beban Pemeliharaan Jalan dan Jembatan-Jalan-Jalan Tol				
8.1.02.03.04.0006	Pengadaan dan Pemasangan Tiang Tiang PJU	Bandung Caang Baranang Teguran Gubernur	Unit	24,041,609	5.2.04.01.01.0004
8.1.02.03.04.0006	Pengadaan dan Pemasangan Tiang Tiang PJJ	Bandung Caang Baranang Teguran Gubernur	Unit	3,471,632	5.2.04.01.01.0004

Plt. WALI KOTA BANDUNG
TTD.

YANA MULYANA

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
PADA SEKRETARIAT DAERAH KOTA BANDUNG

[Signature]

SANTOSA LUKMAN ARIEF, S.H.
Penata Tingkat I
NIP. 19760604 200604 1 002